

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kakao merupakan komoditas andalan perkebunan di Indonesia, karena berperan penting dalam perekonomian Indonesia yaitu sebagai penghasil devisa negara, sumber pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja petani, mendorong agribisnis dan agroindustri serta pengembangan wilayah (Ditjenbun, 2013). Selain itu perkebunan kakao dengan struktur tajuk berstrata dua dan tiga, berfungsi sebagai penyangga kelestarian lingkungan.

Tanaman kakao mulai dikembangkan di Indonesia sekitar tahun 1980 –an, sehingga produktifitasnya sudah menurun dan sudah saatnya dilakukan perbaikan tanaman melalui peremajaan, rehabilitasi, dan intensifikasi (Kementerian Pertanian Jakarta, 2013). Berdasarkan yang disampaikan tersebut, untuk mengatasi dampak yang semakin memburuk maka Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Pertanian pada tahun 2011 tentang pembentukan tim koordinasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao yang telah direncanakan memberikan dampak yang positif bagi kalangan petani. Serta kebijakan gernas kakao merupakan salah satu upaya dalam mempercepat peningkatan produktifitas tanaman dan mutu hasil kakao nasional dengan mengoptimalkan seluruh potensi pemangku kepentingan dan sumber daya yang ada.

Berdasarkan data masukan strategis dari forum kemitraan kakao berkelanjutan memberikan penjelasan bahwa Forum Kemitraan Kakao Berkelanjutan atau '*Cocoa Sustainability Partnership*' (CSP), yang anggota-

anggotanya merupakan semua stakeholder yang peduli terhadap pengembangan kakao di Indonesia, menyambut gembira kehadiran Program Gerakan Revitalisasi Kakao Nasional (GERNAS) yang dicanangkan Departemen Pertanian Republik Indonesia. Program GERNAS ini adalah suatu terobosan yang inovatif dan berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani kakao, khususnya petani di Kawasan Timur Indonesia. Berdasarkan hal di atas, CSP sangat berkepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan Program GERNAS dengan berupaya memberikan sumbangan pikiran yang dihimpun dari segenap anggota forum CSP melalui workshop di Bali pada tanggal Oktober 31- November 1, 2008, yang dihadiri oleh wakil-wakil instansi terkait (pemerintah pusat maupun daerah bersama-sama dengan organisasi swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat) dan dilanjutkan dengan beberapa pertemuan berikutnya.

Pedoman umum Gernas Kakao tahun 2013 memberikan pemahaman bahwa upaya pengembangan kakao dihadapkan berbagai kendala antara lain (a) produktivitas tanaman dibawah potensi normal; (b) adanya berbagai serangan hama penyakit yang sulit dikendalikan oleh petani secara individual; (c) mutu biji rendah; (d) industri hilir dalam negeri belum berkembang sehingga masih dalam bentuk produk primer; (d) sulitnya petani mendapatkan pendanaan khusus untuk pengembangan kakao.

Permasalahan yang menimpa usahatani, sistem produksi dan industri kakao secara umum juga mulai bermunculan, terindikasi dari fluktuasi dan bahkan stagnansi produksi dan ekspor kakao pada dekade sekarang ini setelah 20 tahun terjadinya peningkatan. Masalah yang dihadapi petani kakao Indonesia adalah: (a) serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); (b) penurunan tingkat

produktivitas; (c) rendahnya kualitas biji kakao yang dihasilkan karena praktek pengelolaan usahatani yang kurang baik maupun sinyal pasar dari rantai tataniaga yang kurang menghargai biji bermutu; (d) tanaman sudah tua; dan v) pengelolaan sumber daya tanah yang kurang tepat dalam Pedoman umum Gernas Kakao tahun 2013.

Provinsi Sulawesi Selatan banyak bertumpu pada komoditas hasil pertanian, terutama komoditas kakao. Serta komoditas kakao telah dijadikan sebagai “komoditas-citra-unggulan” di wilayah ini, karena selain memberi kontribusi yang besar dalam struktur perekonomian daerah, juga telah berperan sebagai penyedia lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk di daerah ini. Adapun Luas areal pertanaman kakao di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 257.313,20 ha dengan total produksi sebesar 110.009,45 ton biji kering per tahun (Disbun Sulsel, 2015). Selain itu, kakao dibudidayakan petani dan tersebar di berbagai kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini, salah satunya adalah Kabupaten Bulukumba.

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu penghasil kakao yang potensial. Serta tanaman kakao menjadi primadona petani di samping usaha pertanian lainnya, sebab pembudidayaannya relative lebih mudah. Selain itu pola budidaya tanaman kakao oleh masyarakat masih tradisional dan hanya sebahagian kecil yang melakukan teknis budidaya yang cukup baik dibanding petani lainnya. Hal ini berdampak pada rendahnya produktifitas dan mutu produk tanaman kakao. Dilihat dari segi kelembagaan petani, masih sangat sederhana dan hanya beberapa yang bisa bertahan sejak dibentuknya (Disbun Kabupaten Bulukumba, 2014), sehingga dibutuhkan suatu program pendampingan dan penguatan pada

kelembagaan petani yang ada. Program Gernas Kakao juga diharapkan menjadi salah satu program yang dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan dan penguatan kelembagaan petani di daerah ini.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: Kpts.// /2013 tentang penetapan kelompok tani dan petani peserta program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan (gernas kakao) Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 menjelaskan bahwa Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu penghasil kakao di Indonesia mempunyai potensi untuk menghasilkan kakao dengan kualitas yang baik. Hal ini ditunjang oleh kondisi iklim seperti curah hujan tahunan dan suhu harian rata-rata yang sangat ideal bagi pertumbuhan tanaman dan perkembangan biji kakao. Selain itu, potensi ini hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga perekonomian daerah dapat berkembang serta kesejahteraan petani dapat meningkat.

Luas areal pertanaman kakao di Kabupaten Bulukumba 8.225 ha dengan total produksi 4.882.10 ton dari jumlah petani 11.572 per KK (Disbun Kabupaten Bulukumba, 2014). Disbun Kabupaten Bulukumba juga memberikan gambaran bahwa masalah perkakaoan di Kabupaten Bulukumba adalah serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) seperti hama Penggerek Buah Kakao (PBK) dan penyakit VSD serta penyakit busuk buah, penurunan tingkat produktivitas, rendahnya kualitas biji kakao (fermentasi) dan tanaman kakao yang sudah tua serta pengelolaan sumber daya tanah yang kurang tepat.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa permasalahan yang kemudian memicu terjadinya ketidakseimbangan antara kebijakan dan yang diharapkan oleh masyarakat setempat, diakibatkan karena

adanya pihak yang tidak transparan dan tidak merata dalam memberikan bantuan sarana dan prasarana baik materi maupun material dalam mensukseskan program Gernas Kakao yang telah dicanangkan oleh pemerintah yang terkait sebelumnya. Serta adanya pihak yang menyalahgunakan wewenang, mementingkan urusan pribadi, adanya unsur politik untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri maupun kelompok sehingga mereka lupa tujuan awal dari kebijakan gerakan nasional kakao sebagai bentuk untuk meningkatkan produktifitas mutu kakao, peningkatan pendapatan dan sumber devisa bagi negara. Program Gernas Kakao juga diharapkan menjadi salah satu program yang dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan dan penguatan kelembagaan petani di daerah ini. Melalui program Gernas Kakao tahun 2010 di Kabupaten Bulukumba juga dapat meningkatkan minat petani untuk memperbaiki teknis budidaya dan kelembagaan petani kakao di Kabupaten Bulukumba melalui kegiatan peremajaan, rehabilitasi, dan intensifikasi tanaman kakao.

Berdasarkan gambaran di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Evaluasi Kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba”.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana hasil kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba ?
- b. Apa dampak kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hasil kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba
- b. Untuk mengetahui dampak kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kajian ilmiah bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Ilmu Administrasi Negara serta dapat memberikan sumbangan dalam ilmu politik. Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap evaluasi kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba

- b. Manfaat Praktis

- a). Manfaat bagi mahasiswa, dengan adanya penelitian ini mahasiswa sebagai agen perubahan mampu memahami bagaimana evaluasi kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.
- b). Manfaat bagi masyarakat, dengan adanya penelitian tentang evaluasi kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, masyarakat bisa mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan gerakan nasional

peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

- c). Manfaat bagi peneliti, dengan adanya penelitian tentang evaluasi kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, bisa menambah wawasan peneliti dalam melihat dinamika yang berada di masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut David Easton (Agustino Leo, 2012:8) sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu : “para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya.” Easton mengatakan bahwa mereka-mereka berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasikan kebijakan publik itu adalah: orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Robert Eyestone (Agustino Leo, 2012:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Namun sayangnya definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagian besar scholar yang mempelajarinya. Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Carl Friedrich (Agustino Leo, 2012:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sebagaimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan)

sebagaimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud.” Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud dan tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari defenisi kebijakan.

James E. Anderson dalam Agustino (2012:7) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kegiatan ini menitik beratkan kepada apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan atau dimaksud. Definisi diatas memberikan kesimpulan bahwa ada beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa kebijakan publik:

- a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.
- b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah.
- c. Bersangkutan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu.

- d. Bisa bersifat positif yang berarti merupakan bentuk tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu, dan bersifat negatif yang berarti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

B. Evaluasi Kebijakan

Sofyan Efendi (Kadji Yulianto, 2012:30), menegaskan bahwa “sesungguhnya evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga makna; i) evaluasi perumusan kebijakan, ii) evaluasi implementasi kebijakan, iii) evaluasi lingkungan kebijakan. Oleh karena itu, ketiga komponen tersebutlah yang menentukan apakah kebijakan akan berhasil atau tidak. Begitupun dengan Lester (Agustino Leo, 2012:185) evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Dror (Zainal Said, 2012:169) evaluasi adalah sebuah proses yang utuh, mengemukakan elemen-elemen *output*, *input*, kriteria dan standar. Evaluasi dilakukan dengan penilaian terhadap *net output*, yaitu total *output* dikurangi *input*, yang dihasilkan dalam sebuah proses. William Dunn (Kadji Yulianti, 2012:30), juga mengemukakan bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*asesment*). Definisi diatas menyampaikan bahwa evaluasi kebijakan lebih berkenaan dengan kinerja kebijakan, khususnya melihat sejauh mana proses implementasi kebijakan publik.

Thomas Dye (Zainal Said, 2012:170) evaluasi adalah melihat sebagai nilai masa kini dan masa yang akan datang. Dalam hal ini, pengklasifikasian unsur-unsur evaluasi atas nilai manfaatnya, biaya, dalam dimensi waktu, serta antara kelompok sasaran dan non sasaran, sedikit banyak mencerminkan pandangan

yang biasa digunakan dalam ekonomi politik. Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan mengumpulkan data yang relevan dengan penilaian terhadap *net output*, yaitu total *output* dikurangi *input*, yang dihasilkan dalam sebuah proses. Obyek yang menjadi sasaran penilaian guna dijadikan dasar atau alasan dalam rangka untuk menentukan suatu keputusan. Sehingga keputusan yang dibuat akurat dengan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Evaluasi kebijakan harus dapat menyediakan informasi yang bisa dimengerti dan dipergunakan oleh pembuat dan pelaku-pelaku kebijakan yang lain. Edwar A. Suchman (dalam Riant Nugroho, 2003:199) di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
- b. Analisis terhadap masalah.
- c. Deskripsi dan standarnisasi kegiatan.
- d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan atau karena penyebab yang lain.
- f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Jamed Anderson (Riant Nugroho, 2009:541) membagi evaluasi kebijakan publik menjadi tiga yaitu :

- a. Evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional.
- b. Evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan.

- c. Evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai.

Bingham dan Felbinger (Riant Nugroho, 2009:542) membagi Evaluasi kebijakan menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Evaluasi proses, yang fokus pada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan.
- b. Evaluasi dampak, yang fokus pada hasil akhir suatu kebijakan.
- c. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan.
- d. Meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait.

Evaluasi kebijakan publik mencakup tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan karena ketiga komponen tersebutlah yang menentukan apakah kebijakan akan berhasil atau tidak.

1. Fungsi Evaluasi

Evaluasi kebijakan sangat penting dalam menilai suatu kebijakan publik. Karena evaluasi memiliki fungsi yang membuat suatu kebijakan perlu untuk dievaluasi. Dalam analisis kebijakan, Dunn (Megawati Idrus, 2013 : 18) mengemukakan bahwa evaluasi memiliki beberapa fungsi penting antara lain:

- a. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan

serta tujuan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai dalam memecahkan masalah.

- b. Evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Dalam menanyakan kepastian tujuan dan sasaran, analisis dapat menggunakan alternatif sumber nilai maupun landasan dalam bentuk rasionalisme.
- c. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk dalam perumusan masalah maupun rekomendasi pemecahan masalah. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan baru atau revisi terhadap kebijakan dengan menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ada perlu diganti atau diperbaharui.

2. Pendekatan Terhadap Evaluasi

Ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (Subarsono, 2010:124), yakni :

- a. Evaluasi semu adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok atau masyarakat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial.

- b. Evaluasi formal adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa sasaran dan target yang ditetapkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk melihat manfaat atau nilai dari program dan kebijakan.
- c. Evaluasi proses teoritis adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai *stakeholders*. Dalam hal ini, evaluasi keputusan teoritik berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan ditanyakan oleh para *stakeholders*.

3. Indikator Evaluasi

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat biasa dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (Megawati Idris, 2013:20) mencakup lima indikator sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Evaluasi Kebijakan

No	Kriteria	Penjelasan
1.	Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai ?
2.	Kecakupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah ?
3.	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda
4.	Responsifitas	Apakah hasil kebijakan membuat preferensi/nilai

		kelompok dan dapat memuaskan mereka ?
5.	Ketetapan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat ?

Sumber : Riant Nugroho, 2003

Bridgman (Edy Suharto, 2010 : 41), menyampaikan ada empat model evaluasi yang bisa ditetapkan yaitu :

- a. Evaluasi ketetapan (*appropriateness evaluation*). Evaluasi yang dilakukan untuk membantu pembuat kebijakan dalam menentukan apakah sebuah program yang baru perlu dibuat atau apakah program yang ada masih perlu dipertahankan.
- b. Evaluasi efisiensi (*efficiency evaluation*). Menghitung seberapa besar barang dan jasa mampu dihasilkan sesuai dengan sumber daya yang dikeluarkan. Apakah sebuah program secara ekonomi efisien dilihat dari uang publik yang digunakan.
- c. Evaluasi efektifitas (*effectiveness evaluation*). Mengidentifikasi apakah sebuah program menghasilkan dampak yang bermanfaat bagi publik. Apakah dampak yang ditimbulkan program dapat meningkatkan kesejahteraan publik? Apakah program dapat mencapai tujuan-tujuannya?
- d. Evaluasi meta (*meta-evaluation*). Mengevaluasi proses evaluasi itu sendiri. Apakah lembaga-lembaga yang melakukan evaluasi menerapkan model dan metode evaluasi yang profesional? Apakah produser evaluasinya sesuai dengan langkah-langkah evaluasi yang benar? Apakah kriteria evaluasi sesuai dengan variabel-variabel yang diukur.

C. Dampak Kebijakan

Leo Agustino (2012 : 191) bahwa dampak kebijakan lebih memfokuskan atau mencoba untuk menentukan pengaruh dari kebijakan dalam kondisi

kehidupan yang sesungguhnya. Kalimat “berupaya dan mencoba untuk menentukan” dimaksudkan untuk memahami dampak atau pengaruh yang terjadi dari diberlakukannya suatu kebijakan. Agustino juga menyampaikan bahwa dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi, Yaitu :

- a. Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan melibatkan masyarakat;
- b. Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi dan kelompok lain, atau dapat disebut juga dengan eksternalitas atau *spillover effect*;
- c. Kebijakan dapat mempunyai pengaruh dimasa mendatang seperti pengaruhnya pada kondisi yang ada saat ini.
- d. Kebijakan dapat mempunyai dampak yang tidak langsung dan merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota.

Dunn (Kadji Yulianto, 2012: 95), Dalam evaluasi dampak kebijakan membedakan konsekuensi kebijakan menjadi dua jenis, yaitu output dan dampak. Output adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh oleh kebijakan. Sedangkan dampak adalah kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan.

Thomas R. Dye (Megawati Idrus, 2013 : 31) juga mengungkapkan pada dasarnya dampak dari suatu kebijakan mempunyai beberapa dimensi, dan kesemuanya harus diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Thomas R. Dye terdapat lima dimensi dari suatu dampak kebijakan, yaitu:

- a. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dengan demikian, sasaran dalam kebijakan

publik yang diharapkan untuk dipengaruhi oleh kebijakan harus dibatasi, serta dampak yang diharapkan dari kebijakan harus ditentukan dari awal pembuatan kebijakan publik.

- b. Kebijakan mungkin mempunyai dampak terhadap keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan dari yang telah diperkirakan sebelumnya oleh aktor perumus kebijakan.
- c. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang yang akan berpengaruh pada kelompok sasaran maupun di luar sasaran.
- d. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana sedemikian rupa.
- e. Menyangkut biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

William N. Dunn (2003:97) mengungkapkan ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan dampak kebijakan, yaitu :

- a. *Effectiveness*, yaitu apakah kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran yang telah dirumuskan.
- b. *Efficiency*, yaitu apakah kebijakan yang akan diambil itu seimbang dengan sumber dana yang tersedia.
- c. *Adequacy*, yaitu apakah kebijakan itu sudah cukup memadai untuk memecahkan masalah yang ada.

D. Gerakan Nasional Peningkatan Produksi Dan Mutu Tananam (Gernas)

Kakao

Pedoman Umum Gernas Kakao tahun 2013 menyampaikan bahwa Gernas Kakao adalah upaya percepatan peningkatan produktivitas dan mutu hasil kakao nasional melalui pemberdayaan secara optimal seluruh pemangku kepentingan serta sumberdaya yang tersedia. Dengan Sasaran meliputi perbaikan tanaman kakao rakyat seluas 450.000 ha melalui peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, pemberdayaan petani, pengendalian hama dan penyakit, perbaikan mutu kakao, serta penyediaan sarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pedoman umum tahun 2013 kegiatan utama Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao meliputi:

1. Rehabilitasi tanaman seluas 28.280 ha yang kegiatannya meliputi sambung samping, pemotongan batang utama, penanaman pohon pelindung, pemeliharaan hasil sambungan, pemupukan dan pengendalian hama penyakit;
2. Pemberdayaan petani yang pesertanya berasal dari petani yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi kakao, kegiatannya meliputi pelatihan petani dan pendampingan petani oleh tenaga pendamping;
3. Penerapan Standar Mutu yang kegiatannya meliputi penyediaan sarana sosialisasi standar mutu, sosialisasi standar mutu dan penyediaan sarana pasca panen.

Salah satu konsep yang dikembangkan dalam Gernas Kakao yaitu pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini petani kakao. Pemberdayaan petani merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha

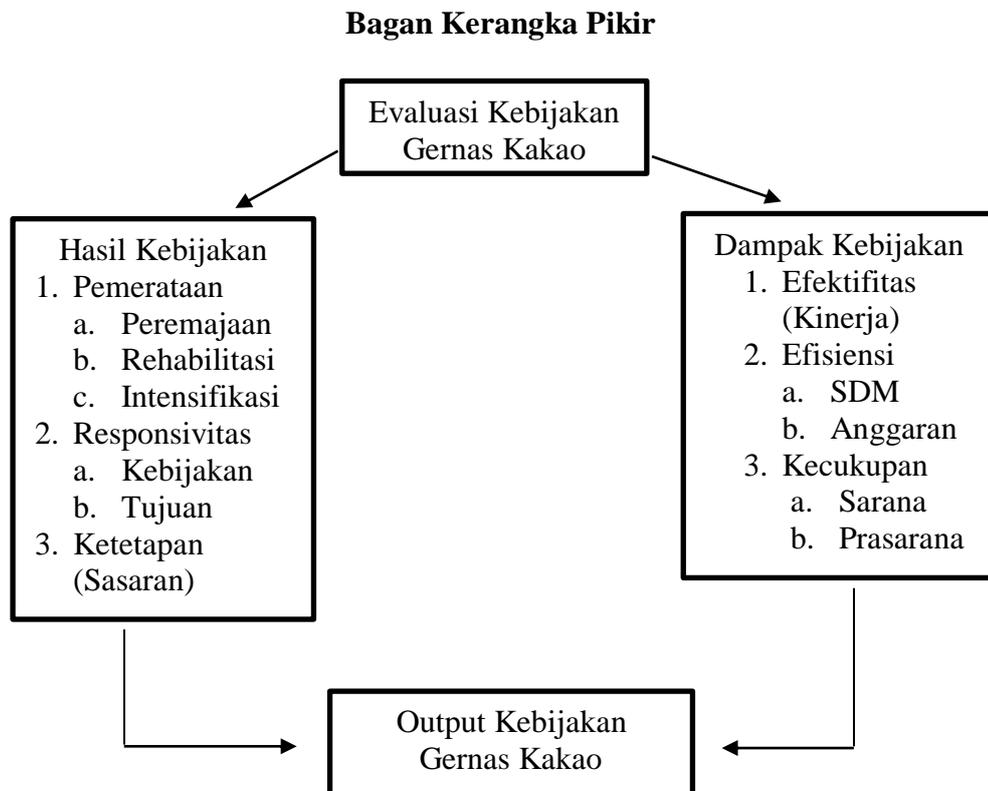
taninya melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap secara bertahap dan berkelanjutan dengan pelatihan dan pendampingan. (Pedoman Teknis, 2013)

Pedoman Teknis tahun 2013 menyampaikan bahwa untuk Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao para petani akan dilatih dan ditingkatkan pengetahuannya dalam pengelolaan usaha taninya melalui pelatihan teknis budidaya, pasca panen, peningkatan mutu, kelembagaan, pengelolaan keuangan dan kemitraan usaha.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini berdasarkan teori tentang evaluasi kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao yang dicanangkan melalui Keputusan Menteri Pertanian tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao sekaligus sebagai surat keputusan agar kebijakan dilaksanakan kembali. Dalam teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, hasil dari kebijakan Gernas Kakao William Dunn (Megawati Idrus, 2013 : 20) dipengaruhi oleh 3 (tiga) cakupan yang ingin dicapai yaitu (a) pemerataan yang dilihat dari (peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi), (b) responsivitas mencakup kebijakan dan tujuan, dan (c) ketetapan yang ingin capai yaitu sasaran awal dari kebijakan ini. Selanjutnya, untuk menganalisa kebijakan Gernas Kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, penelitian ini akan mengamati 3 (tiga) aspek dari dampak kebijakan (William Dunn, 2003 : 97) yang ditimbulkan yaitu (a) efektifitas yang ingin dilihat yaitu kinerja, (b) efisiensi yang ingin dilihat yaitu SDA dan SDM, dan (c) kecukupan yang ingin dilihat yaitu (sarana dan Prasarana) memberikan *output*

yang baik bagi masyarakat dan pemerintah serta memberikan dampak positif bagi suksesnya program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

F. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian didasarkan oleh apa yang akan dilihat dari hasil kebijakan yang ingin dicapai dari gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba mencakup (a) Pemerataan (peremajaan, rehabilitasi, dan intensifikasi), (b) Responsivitas (kebijakan dan tujuan), dan (c) Ketetapan (sasaran). Serta dampak keberhasilan dari kebijakan gernas kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba yang

ingin dilihat dari beberapa aspek yaitu (a) Efektifitas (kinerja), (b) Efisiensi (SDM dan Anggaran), dan (c) Kecukupan (sarana dan prasarana).

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Pemerataan merupakan terpenuhinya rencana kerja atau program kerja kebijakan Gernas Kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba secara adil kepada masyarakat petani kakao. Dilihat dari tujuan utama kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao yaitu (a) Peremajaan, (b) Rehabilitasi, (c) Intensifikasi.
2. Responsivitas merupakan tanggapan masyarakat terhadap kebijakan atau program Gernas Kakao yang akan dilaksanakan di wilayah tersebut. Yang dimaksudkan yaitu (a) Kebijakan, (b) Tujuan.
3. Ketetapan merupakan sasaran kebijakan atau program Gernas Kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba sudah tepat. Yang ingin dilihat yaitu Sasaran.
4. Efektifitas merupakan tercapainya hasil serta tujuan yang diharapkan sesuai program Gernas Kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba yang telah direncanakan yaitu Kinerja
5. Efisiensi merupakan proses kinerja program kebijakan Gernas Kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba menghasilkan keuntungan yang besar, yaitu (a) Sumber Daya Manusia dan (b) Anggaran.
6. Kecukupan merupakan proses penerapan kebijakan Gernas Kakao yang dinilai memadai terhadap kebutuhan masyarakat. Yang mencakup (a) sarana dan (b) Prasarana.

7. Output kebijakan Gernas Kakao hasil yang ingin dicapai agar meningkatkan produktifitas mutu kakao, sumber pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja, terbentuknya pusat pertumbuhan, mendorong agribisnis dan agroindustri kakao dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi penelitian

Penelitian ini telah dilakukan selama 2 Bulan dari tanggal 3 April sampai 3 Juni 2017. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, penelitian ini locusnya berada pada dua wilayah desa yaitu Desa Singa dan Desa Borong, dengan alasan memilih lokasi ini karena memiliki peran penting dalam kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dan didasarkan pertimbangan bahwa dua wilayah desa di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba merupakan wilayah pengembangan kakao.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah kualitatif, Menurut Robert Bogdan dan Steve J. Taylor dalam (Ndraha, 2011) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, ucapan atau tulisan yang dapat diamati dari orang-orang itu sendiri. Penelitian kualitatif juga memberikan gambaran, penjelasan yang tepat secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti melalui pengumpulan data. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memodifikasi data yang telah dikumpulkan di lapangan berdasarkan fenomena sosial.

b. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yang di maksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan. Adapun masalah yang

diteliti mengenai kebijakan pemerintah tentang gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao.

C. Sumber Data Penelitian

Berdasarkan perolehannya, penulis membagi dua jenis data yaitu :

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara pihak yang bersangkutan.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur literatur yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional dan data lainnya.

D. Informan Penelitian

Penentuan narasumber (informan) dalam penelitian ini untuk diwawancarai secara mendalam dilakukan dengan cara peneliti memilih orang tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni pihak-pihak yang terlibat sebagai partisipan dalam kegiatan penelitian ini yakni :

Tabel 2. Data Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Ket
1	Ir. Ab. Iskandar, M.Si	IS	Kepala Bidang Hortikultura Perkebunan	1
2	Sulriana, SP., MM	SU	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	1
3	Sudirman, S.ST.,M.Si	SD	Kepala Bidang Penyuluhan	1
4	Asri B	AS	Ketua Kelompok Tani I Desa Singa	1
5	Paharuddin	PA	Ketua Kelompok Tani II Desa Singa	1
6	Andi Makkasulle	MA	Ketua Kelompok Tani 1 Desa Borong	1
7	Ha'ding	HA	Ketua Kelompok Tani III Desa Borong	1
8	Total			7

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Percakapan yang dilakukan secara langsung dan tatap muka yang dilakukan oleh peneliti dengan maksud ingin mengetahui apakah kebijakan yang telah berjalan selama 5 tahun terakhir memang memberikan dampak atau sudah terevaluasi dengan baik dan maksimal. Percakapan yang dilakukan oleh peneliti baik melakukan wawancara dengan pemerintah yang bersangkutan yang memang mengetahui betul apa tujuan dan sasaran dari adanya kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao serta peneliti mewawancarai masyarakat sekitar yang termasuk ikut serta. Dalam penelitian ini informan yang akan diwawancarai adalah pegawai dinas kehutanan dan perkebunan daerah Kabupaten Bulukumba, kepala desa di wilayah yang disebutkan, ketua kelompok tani di desa tersebut, dan masyarakat tani yang ikut serta melakukan program gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berupa data hasil wawancara, dokumen-dokumen mengenai kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao, dokumen-dokumen tertentu seperti regulasi mengenai kebijakan atau program yang dicanangkan oleh pemerintah tentang gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao yang berkaitan dengan wilayah yang ingin diteliti sebelumnya, data yang dikumpulkan berupa data yang dialami langsung oleh masyarakat yang diikuti sertakan agar program

kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao agar tujuan dan sasaran dari program ini tercapai.

c. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung mengamati di lapangan, mengamati langsung perkembangan yang terjadi, menganalisa setiap percakapan masyarakat dengan pemerintah yang bersangkutan dalam kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao, terkadang ikut serta dalam sosialisasi kebijakan ini setiap ada rapat mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan selanjutnya agar kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba sesuai dengan yang diharapkan pemerintah dan masyarakat. Dalam penelitian ini, yang akan diobservasi adalah menyangkut tentang evaluasi atau dampak kebijakan gernas kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

F. Teknik Analisis data

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014) terdapat tiga tipe teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

a. Reduksi Data

Adalah salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir rapat diambil.

b. Penyajian data

Adalah salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

c. Penarikan kesimpulan

Adalah salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

G. Pengabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014), Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi waktu, triangulasi metode, dan triangulasi sumber :

- a. Triangulasi metode adalah dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan penggambaran yang utuh mengenai informasi tertentu.
- b. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data, misalnya selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, dan lain-lain. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang

berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

- c. Triangulasi waktu adalah waktu yang sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat pula dilakukan dengan mengecek hasil penelitian. Dari itu peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba

Mitologi penamaan “Bulukumba”, konon bersumber dari dua kata dalam bahasa bugis yaitu “Bulu’ku” dan “Mupa” yang dalam bahasa Indonesia berarti “masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya”. Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke-17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar Sulawesi yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang bernama “Tana Kongkong”, di situlah utusan Raja Gowa dan Raja Bone bertemu, mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing. Bangkeng Buki’ (secara harfiah berarti kaki bukit) yang merupakan barisan lereng bukit dari Gunung Lompobattang diklaim oleh pihak Kerajaan Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke wilayah bagian timur. Namun pihak Kerajaan Bone bersikeras mempertahankan Bangkeng Buki’ sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari barat sampai ke selatan.

Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis “Bulu’kumupa” yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi “Bulukumba”. Konon sejak itulah nama Bulukumba mulai ada dan Hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten. Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan daerah-daerah

Tingkat II di Sulawesi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, tentang Lambang Daerah.

Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya) maka ditetapkan hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994. Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan bupati pertama yaitu Andi Patarai tanggal 12 februari 1960.

2. Keadaan Geografis Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba terletak dibagian selatan dari jazirah Sulawesi Selatan dan berjarak 153 km dari Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,7 km² atau 2,5 % dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 kecamatan yaitu Kecamatan Ujungbulu (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Ujungloe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Tiga Kecamatan sentra pengembangan pertanian dan perkebunan yaitu Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, dan Kecamatan Bulukumpa.

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20'' sampai 5°40'' Lintang Selatan dan 119°50'' sampai 120°28'' Bujur Timur.

Batas-batas wilayah adalah :

Sebelah Utara : Kabupaten Sinjai

Sebelah Selatan : Laut Flores

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Barat : Kabupaten Bantaeng

Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke Utara dengan ketinggian 100 sampai dengan di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82°C-27,68°C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith-Ferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klarifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah.

Sungai di Kabupaten Bulukumba ada 32 aliran yang terdiri dari sungai besar dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 603,50 km dan yang terpanjang adalah sungai sangkala yakni 65,30 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai biroro yakni 1,50 km. Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23,365 Ha. Kepadatan penduduk Kabupaten Bulukumba pada tahun 2009 yaitu rata-rata 340 jiwa per km². Kecamatan Ujungbulu mempunyai kepadatan yang tinggi dikarenakan sebagai ibukota Kabupaten dan aktivitas yang tinggi dengan jumlah penduduk yang besar dan luas daerah relatif kecil jika dibandingkan kecamatan lainnya.

3. Profil Kecamatan Herlang

Kecamatan Herlang merupakan salah satu kecamatan dari 10 kecamatan di Kabupaten Bulukumba yang mana dulunya merupakan suatu distrik dari Hero dan

Lange-lange. Kecamatan ini berada di Pesisir timur dari Propinsi Sulawesi Selatan, dan adapun batas-batasnya yaitu :

Utara : Kecamatan Kajang

Timur : Teluk Bone

Selatan : Kecamatan Bonto Tiro

Barat : Kecamatan Ujung Loe

Secara geografis Kecamatan Herlang berada di lintang $5^{\circ}21'38.61''$ LS sampai $5^{\circ}27'8.79''$ LS dan $120^{\circ}18'29.12''$ BB sampai $120^{\circ}26'3.15''$ BB. Dengan ibu kota Kecamatan Tanuntung yang berada di Kelurahan Tanuntung. Adapun luas Kecamatan Herlang yaitu 6.879 Ha sebagaimana 6,47 % berada pada ketinggian 0-25 m dpl, 57,28 % yang berada pada ketinggian 25-100 m dpl dan 36,25 % yang berada pada ketinggian 100-500 m dpl. Sedangkan untuk kemiringan lerengnya memiliki variasi yaitu mulai dari 0 % sampai lebih dari 40%. Daerah ini merupakan salah satu produsen jagung, selain itu kecamatan ini juga memiliki tempat wisata yaitu Pantai Turunan Beru di Tanuntung dan rumah adat saoraja di Borong.

4. Profil Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba mempunyai kedudukan sebagai unsur lembaga teknis dibidang Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan serta Pengembangan SDM dan Penyuluhan. Dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dalam mendukung terwujudnya tujuan

sistem perencanaan pembangunan nasional baik dibidang pertanian maupun dibidang lain, antara lain : mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya intergrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian sub sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta peternakan dan dibidang kehutanan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bulukumba.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d) Pelaksanaan tugas lain yang ditentukan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Visi dan Misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah *“Terwujudnya masyarakat petani yang maju dan sejahtera melalui pembangunan sistem agribisnis yang berdaya saing, kerakyatan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”*

Misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan yaitu sebagai berikut :

- a) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan, agroklimat komoditas unggulan/andalan daerah dan SDM pertanian.
- b) Meningkatkan kualitas SDM baik aparat pertanian maupun pelaku agribisnis khususnya petani.
- c) Mengembangkan inovasi teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan.
- d) Mendorong tumbuh dan berkembangannya sentra-sentra agribisnis komoditi unggulan berskala ekonomi.
- e) Pemberdayaan masyarakat petani menuju masyarakat wirausaha/wiraswasta agribisnis yang mandiri, maju, dan efisien.

B. Hasil Kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi Dan Mutu Kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba

Hasil kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba merupakan sebuah penilaian keberhasilan suatu kebijakan yang dinilai sudah mencapai target dari apa yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat, yang ingin dilihat dari keberhasilan kebijakan ini mencakup (1) Pemerataan (peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi, (2) Responsivitas (kebijakan dan tujuan, dan (3) Ketetapan (sasaran).

1. Pemerataan

Suatu proses penyebaran rencana kerja atau program kerja dari kebijakan pemerintah untuk menjalankan tujuan dari kebijakan ini dirumuskan dan sasaran yang ingin dicapai secara merata. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat mengetahui bahwa program yang dijalankan pemerintah setempat untuk mensukseskan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba belum tersebar secara merata khususnya bagi para petani yang betul-betul membutuhkan bantuan dari program atau kebijakan ini agar mencapai hasil yang maksimal. Yang ingin dilihat dari kebijakan ini yaitu (a) peremajaan, (b) rehabilitasi, dan (c) intensifikasi:

1.a Peremajaan

Suatu proses dalam kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao untuk mengganti tanaman tua dengan tanaman baru yang bermutu sehingga menghasilkan tanaman kakao yang bermutu dan berkualitas. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Bidang Hortikultura Perkebunan Kabupaten Bulukumba yang menjelaskan bahwa :

“Program Gernas kakao belum sampai kepada semua masyarakat khususnya masyarakat petani yang betul-betul membutuhkan untuk ikut serta dalam kebijakan ini. Contohnya dalam peremajaan untuk benih dan tanaman kakao agar memiliki mutu dan kualitas yang baik namun keterbatasan jumlah tanaman yang baik yang diakibatkan hama dan penyakit lainnya” (wawancara dengan IS. Senin, 10-04-2017).

Program atau kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di wilayah tersebut belum menyentuh semua masyarakat petani kakao karena program ini memiliki keterbatasan jumlah. Sesuai dengan contoh dalam kebijakan ini memiliki tugas utama yaitu peremajaan yang bertujuan agar tanaman tua diganti dengan tanaman yang baru namun karena adanya serangan hama dan

penyakit lainnya maka menyebabkan kualitas mutu kakao mengalami penurunan drastis. Senada dengan itu, Ketua Kelompok Tani II Desa Singa mengatakan bahwa :

”Peremajaan dalam kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba yang dilakukan dikalangan masyarakat petani kakao belum sampai kesemua masyarakat petani dikarenakan bantuan baik berupa sarana dan prasarana yang diprogramkan dari gernas kakao ini terbatas dan program ini diatur berdasarkan Keputusan Bupati Bulukumba dan Keputusan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.” (wawancara dengan PA. Senin, 18-04-2017).

Peremajaan adalah tugas utama dari kebijakan gernas kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba tidak tersebar secara merata dikarenakan program ini terbatas memberikan bantuan kepada masyarakat dalam peningkatan produksi dan mutu kakao dan program ini memiliki aturan tertulis karena program ini memiliki berapa tahap dalam memilih masyarakat petani dari segi lahan dan dari segi petani itu sendiri karena kebijakan ini memiliki aturan tersendiri serta memiliki keterbatasan sarana dan prasarana untuk setiap wilayah yang disentuh oleh program pemerintah. Senada dengan itu, Ketua Kelompok Tani I Desa Singa mengatakan bahwa:

“Kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao memang belum merata buktinya anggota dari kelompok saya masih ada yang belum mendapat apa yang menjadi hak mereka sebagai anggota dari program yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat” (wawancara dengan AS. Rabu, 12-04-2017).

Kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba belum merata sehingga mengakibatkan anggota kelompok lain tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan guna untuk terselenggaranya kebijakan ini dengan baik, namun

apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Berikut juga pernyataan Kepala Bidang sarana dan prasarana mengatakan bahwa:

“Peremajaan yang dilakukan memang belum merata dengan baik sebab masyarakat ingin jika semua bantuan untuk menjalankan program ini difasilitasi oleh pemerintah yang bersangkutan sehingga tidak ada kerjasama yang baik antar masyarakat dengan pemerintah” (wawancara dengan SU. Senin, 10-04-2017).

Peremajaan yang dilakukan belum memenuhi standar dari indikator kebijakan yang telah memenuhi kebutuhan masyarakat sebab masyarakat khususnya petani kakao mementingkan kepentingan sendiri dan selalu ingin dibantu, serta tidak memiliki inisiatif sendiri agar memiliki keterampilan dalam memberikan perawatan kepada tanaman kakao mereka agar peningkatan produksi dan mutu kakao makin meningkat dan memeberikan manfaat yang baik.

1.b Rehabilitasi

Suatu proses kegiatan kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao dalam menempelkan atau menumbuhkan entres yang berasal dari klon unggul pada tanaman tua agar menghasilkan tanaman entres yang bermutu untuk kesejahteraan masyarakat petani. Hal ini ditegaskan pula oleh Ketua Kelompok Tani I Desa Singa di Kecamatan Herlang menyatakan bahwa :

“Dalam program Gernas kakao ini masih banyak tanaman atau entres yang harus diperhatikan dengan seksama maka rehabilitasi diperlukan di lapangan namun tidak dapat memberikan masyarakat petani kakao bantuan yang sesuai diakibatkan karena bantuan yang diberikan tidak memenuhi kuota.” (wawancara dengan AS. Rabu, 12-04-2017).

Program gernas kakao ini masih banyak tanaman atau entres yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat petani karena tidak semua menyentuh petani kakao yang betul-betul membutuhkan untuk ikut serta dalam kebijakan pemerintah yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat sampai ke Kabupaten.

Tetapi karena keterbatasan dari program ini maka yang yang mendapatkan rehabilitasi tanaman kakao yaitu yang telah terdaftar itupun masih dibatasi dan masyarakat lebih cenderung fokus kepada bantuan sarana dan prasarana untuk lahan mereka tanpa memiliki inisiatif berpikir untuk bagaimana mengelolah tanaman kakao mereka agar memiliki mutu yang berkualitas. Senada dengan itu, Kelompok Tani I Desa Borong juga menyatakan bahwa :

“Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan di wilayah kami memang belum merata sepenuhnya karena fasilitas yang diberikan dari program gernas kakao memang terbatas dan memang dilakukan seleksi baik dari lahannya maupun dari petani kakao itu sendiri dan masyarakat petani juga tidak mengerti dan memahami betul apa yang ingin dicapai dari kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao.” (wawancara dengan MA. Rabu, 12-04-2017).

Kegiatan rehabilitasi kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba secara teknis tidak merata sebab apa yang dijanjikan dari program pemerintah ini untuk mensukseskan program ini sarana dan prasarananya terbatas. Serta masyarakat selalu mengharapkan bantuan sedangkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terbatas dan memiliki aturan tersendiri. Senada pula dengan, Ketua Kelompok Tani III Desa Borong mengatakan bahwa:

“Rehabilitasi dari kebijakan ini memberikan dampak positif bagi kelangsungan mutu tanaman kakao, namun memberikan dampak negatif bagi masyarakat karena cenderung ingin dibantu tanpa memikirkan jalan keluar agar mereka memiliki keterampilan untuk dapat mengelolah hasil bumi mereka dengan baik khususnya tanaman kakao agar memiliki mutu yang bisa dipertimbangkan oleh negara lain” (wawancara dengan HA. Rabu, 19-04-2017).

Rehabilitasi memberikan dampak positif bagi mutu tanaman kakao, dari kebijakan ini pula memberikan dampak negatif bagi masyarakat karena cenderung ingin dibantu tanpa memikirkan jalan keluar agar mereka memiliki

keterampilan untuk dapat mengelolah hasil bumi mereka dengan baik khususnya tanaman kakao agar memiliki mutu yang bisa dipertimbangkan oleh negara lain.

Berikut pula dengan, Ketua Kelompok Tani I Desa Borong mengatakan bahwa:

“Kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba memberikan dampak positif bagi produksi dan mutu kakao dan memberikan bantuan kepada masyarakat agar memberikan keterampilan dalam pengelolaan tanaman kakao yang baik agar mendapatkan mutu atau kualitas yang baik” (wawancara dengan MA. Rabu, 12-04-2014).

Kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba memberikan dampak yang baik bagi produksi dan mutu kakao dan memberikan manfaat yang sangat baik karena memberikan masyarakat keterampilan dalam mengelolah tanaman kakao dengan baik agar mencapai tanaman kakao yang memiliki mutu dan berkualitas yang mampu bersaing dengan dunia.

1.c Intensifikasi

Suatu kegiatan dalam pemberian sarana dan prasarana produksi berupa pupuk dan pestisida dan menerapkan sistem perbaikan mutu produksi dan pasca panen melalui pemberian bantuan unit pelayanan hasil kakao untuk menghasilkan kakao fermentasi dan unit pengelolaan coklat. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Bidang Hortikultura Perkebunan Kabupaten Bulukumba yang menjelaskan sebagai berikut :

“Intensifikasi adalah tugas utama yang ketiga untuk program kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao yang memiliki tujuan sebagai perbaikan mutu produksi dan pasca panen untuk menghasilkan kakao yang bermutu namun karena keterbatasan sarana dan prasarana mengakibatkan kegiatan ini juga mengalami kendala” (wawancara dengan IS. Senin, 10-04-2017).

Intensifikasi salah satu kegiatan utama dalam suksesnya kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao yang memiliki tujuan sebagai perbaikan mutu produksi dan pasca panen untuk menghasilkan kakao yang bermutu namun karena keterbatasan sarana dan prasarana mengakibatkan kegiatan ini juga mengalami kendala karena apa yang diharapkan masyarakat petani kakao tidak sesuai dengan harapan karena adanya penyalahgunaan wewenang. Senada dengan itu, Ketua Kelompok Tani III Desa borong menyatakan bahwa :

“Kegiatan intensifikasi ini tidak dapat berjalan dengan baik ketika tidak mengetahui jelas apa tujuan dari kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao tetapi hanya mementingkan kepentingan pribadi masing-masing dan melupakan apa hak dan kewajiban mereka yang telah mengikuti kegiatan atau program ini dirumuskan” (wawancara dengan HA, Rabu, 19-04-2017).

Kegiatan intensifikasi tidak berjalan sesuai porsinya karena pemerintah tidak menjelaskan secara detail seperti apa itu intensifikasi dan tujuan dari tugas utama yang ketiga dari kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba tidak berjalan dengan baik sebab adanya oknum yang menyalahgunakan wewenang dan lupa akan hak dan kewajiban turut serta dalam kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao. Senada pula dengan, Kepala Bidang sarana dan prasarana mengatakan bahwa:

“Intensifikasi memang tidak berjalan dengan baik karena tidak banyak dari mereka yang mengetahui betul tujuan dari kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao dan hanya sedikit dari mereka yang memiliki keterampilan dalam mengelola tanaman kakao mereka agar menghasilkan produksi yang bermutu” (wawancara dengan SU. Senin, 10-04-2017).

Kegiatan intensifikasi di Kecamatan herlang tidak berjalan dengan baik karena masyarakat khususnya petani kakao tidak memiliki keterampilan dalam

mengelola tanaman kakao mereka padahal kakao adalah salah satu sumber devisa negara serta berperan penting sebagai sumber perekonomian masyarakat di daerah tersebut, juga karena kurangnya kerjasama antar pemerintah dan masyarakat sehingga tidak menghasilkan produksi yang bermutu. Berikut pula dengan, Ketua Kelompok Tani I Desa Singa mengatakan bahwa:

“Kegiatan intensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik sebab masih banyak yang tidak terpenuhi contohnya masih banyak masyarakat yang ingin diberikan bantuan baik berupa moril maupun material, namun karena pemerintah memiliki keterbatasan sehingga tidak banyak dari anggota kelompok saya yang mendapatkan hak dari kebijakan ini” (wawancara dengan AS. Rabu, 12-04-2014).

Kebijakan pemerintah tentang gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao yang berjalan di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba masih belum merata baik dalam hal intensifikasi tanaman dan tugas utama lainnya yang ingin dicapai oleh kebijakan ini. Masyarakat juga tidak mengetahui jelas apa tujuan dari kebijakan ini serta sasaran yang ingin dicapai sehingga kebijakan ini tidak berjalan sesuai harapan.

2. Responsivitas

Tanggapan responden atau masyarakat tentang kebijakan atau program yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat mengetahui bahwa program yang dijalankan pemerintah setempat untuk mensukseskan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba tidak direspon dengan baik oleh para petani yang betul-betul membutuhkan bantuan dari program atau kebijakan ini. Berikut dua hal yang menjadi tolak ukur apakah yang menerima kebijakan

memang mengetahui apa saja kebijakan dan tujuan dari kebijakan gernas kakao tersebut yaitu (a) kebijakan dan (b) tujuan.

2.a Kebijakan

Sebuah landasan utama untuk menjalankan atau mengimplementasikan agar kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao berjalan sesuai porsinya. Namun yang terjadi di lapangan tidak sesuai, hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kabupaten Bulukumba bahwa :

“Kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba memiliki dampak yang sangat baik untuk masyarakat sekitar khususnya masyarakat petani kakao. Sebagian dari masyarakat petani kakao yang mengikuti program ini namun tidak mengetahui jelas apa isi dari kebijakan ini” (wawancara dengan SU. Senin, 10-04-2017).

Pemerintah yang bersangkutan dalam program ini sudah memberikan informasi kepada masyarakat petani tentang batasan-batasan dari kebijakan ini, tentang hak dan kewajiban mereka berdasarkan Keputusan Bupati dan Keputusan Dinas Kehutanan dan Perkebunan tetapi beberapa orang dari mereka hanya diikuti sertakan dalam berjalannya program kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di wilayah tersebut karena adanya kepentingan pribadi di dalamnya. Senada dengan itu, Ketua Kelompok Tani I Desa Singa Menyatakan Bahwa :

“Dalam Program ini memang masih banyak Masyarakat petani yang belum memahami dengan baik apa isi dari kebijakan gernas kakao dirumuskan, dan ketika giliran SDA mereka disurvei mereka baru mempertanyakan kembali kenapa lahan mereka disurvei dan selanjutnya dilakukan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi karena pihak yang menjelaskan tentang apa isi dari kebijakan yang ingin dicapai tidak menjelaskan secara rinci batasan-batasan dari kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao dicanangkan oleh pemerintah.” (wawancara dengan AS. Rabu, 12-04-2017).

Program gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba masyarakat petaninya yang mengikuti program ini tidak memahami dengan baik karena pemerintah yang memiliki wewenang penuh tidak menjelaskan secara mendetail apa maksud serta seperti apa kegiatan kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao yang dilakukan di wilayah mereka yang hanya diikuti sertakan agar program ini berjalan saja serta adanya unsur kepentingan pribadi segelintir oknum yang memainkan perannya. Senada juga dengan, Kepala Bidang Penyuluhan mengatakan bahwa :

“Masyarakat yang terdaftar untuk mengikuti program gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Khususnya di Desa Singa dan Desa Borong masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda-beda jadi mereka mengeluhkan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dengan keluhan mereka memberikan respon yang baik” (wawancara dengan SD. Selasa, 11-04-2014).

Masyarakat memberikan respon yang baik terhadap terselenggaranya kebijakan ini khususnya di Desa Singa dan Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, namun masyarakat di wilayah tersebut tidak mengetahui dengan baik apa yang ingin dicapai dari kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao yang telah dicanangkan oleh pemerintah berapa tahun yang lalu. Berikut pula dengan, Ketua Kelompok Tani II desa Singa Mengatakan bahwa:

“Dengan adanya kebijakan ini membuat masyarakat khususnya petani kakao merasakan dampak yang positif bagi kelangsungan tanaman mereka namun mereka belum memahami betul apa yang telah dijelaskan oleh pemerintah tentang apa isi dan yang diharuskan dari kebijakan ini” (wawancara dengan PA. Senin, 18-05-2017).

Kebijakan ini membuat masyarakat khususnya petani kakao memberikan dampak yang baik bagi kelangsungan tanaman mereka tetapi masyarakat setempat yang mengikuti kebijakan ini belum memahami dengan baik apa isi dari kebijakan ini dan yang terjadi di lapangan berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan melihat bahwa pemerintah yang bersangkutan tidak menjelaskan dengan mendetail apa tujuan dari kebijakan ini.

2.b Tujuan

Suatu keinginan atau dan cita-cita bersama untuk mensukseskan kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Namun yang terjadi kemudian di lapangan tidak sesuai dengan apa tujuan awal dari kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Bidang Hortikultura Perkebunan yang menyatakan bahwa :

“Dalam Kebijakan ini memang mereka belum memahami jelas tujuan dari kebijakan gernas kakao tersebut dirumuskan dan mereka cenderung lebih memilih masa bodo dengan program tersebut, yang jelas SDA mereka terdaftar agar mendapatkan bantuan dan adanya ketidaktahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebab pemerintah tidak memberikan pemahaman yang memang benar-benar membuat mereka memahami terhadap hak dan kewajiban mereka.” (wawancara dengan IS. Senin, 10-04-2017).

Program gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao tidak banyak yang mengetahui apa tujuan dan sasaran dari kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah, hanya segelintir yang mengetahui betul apa tujuan dan sasaran dari kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao yang sudah dilakukan di wilayah mereka demi mencapai peningkatan produksi dan mutu kakao, sumber pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja serta sumber devisa negara. Senada dengan itu, Kepala Bidang Penyuluhan menyatakan bahwa :

“Masyarakat petani kakao tidak mengetahui betul apa tujuan dari adanya kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao sehingga apa yang sebenarnya diharapkan dari adanya kebijakan ini tidak dapat dirasakan secara maksimal karena masyarakat petani kakao lebih cenderung acuh dan ada oknum yang menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan maka tidak maksimal” (wawancara dengan SD. Selasa, 11-04-2017).

Masyarakat petani kakao tidak mengetahui apa tujuan kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao dicanangkan oleh pemerintah sehingga apa yang diharapkan tidak maksimal sebab masyarakat cenderung masa bodoh terhadap kebijakan ini sebab lebih mengharapakan bantuan dan ada segelintir orang yang mencoba menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan pribadi maupun kelompok sehingga apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan.

Senada pula dengan, Kepala Bidang Hortikultura Perkebunan Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa:

“Tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao adalah peningkatan produksi dan mutu tanaman kakao namun masyarakat tidak memberikan respon yang baik demi berlangsungnya kebijakan ini dengan baik” (wawancara dengan IS. Senin, 10-04-2017).

Tujuan kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao adalah untuk mencapai peningkatan produksi, mutu tanaman kakao, pendapatan masyarakat petani kakao dan sumber devisa negara, namun karena kurangnya kerjasama yang baik sehingga membuat kebijakan ini tidak berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Berikut juga dengan, Ketua kelompok I Desa Borong mengatakan bahwa:

“Masyarakat Khususnya anggota dari kelompok saya memang tidak mengetahui dengan baik apa saja tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba sebab pemerintah tidak

menjelaskan secara detail apa tujuan dari adanya kebijakan gernas kakao di wilayah tersebut” (wawancara dengan MA. Rabu, 12-04-2017).

Masyarakat yang terdaftar dengan program kebijakan yang telah dicanangkan pemerintah tidak mengetahui dengan baik apa tujuan dari adanya kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di wilayah tersebut sebab pemerintah hanya menjelaskan apa yang menurut mereka penting untuk diberitahukan kepada masyarakat khususnya yang ikut serta dalam kegiatan ini.

3. Ketetapan

Sasaran atau pemberian program gernas kakao yang dilaksanakan untuk masyarakat sudah tepat karena masyarakat yang ada di Desa tersebut sudah mengetahui adanya program gernas kakao. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat mengetahui bahwa program yang dijalankan pemerintah setempat untuk mensukseskan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba belum tepat sasaran atau tidak berjalan dengan maksimal. Adapun ketetapan yang dimaksudkan yaitu sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao.

a Sasaran

Suatu perencanaan yang dilakukan, yang formulasinya dilakukan pada tahap awal dari siklus perencanaan agar mencapai tujuan dari kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Bidang Hortikultura Perkebunan Kabupaten Bulukumba yang menjelaskan bahwa :

“Dalam Kebijakan ini sasaran yang ingin dicapai belum maksimal karena disebabkan peningkatan pendapatan masih rendah, produktivitas tanaman kakao masih rendah, dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan mutu tanaman kakao masih sedikit yang tahu bagaimana pemanfaatan tanaman kakao yang baik.” (wawancara dengan IS. Senin, 10-04-2017).

Sasaran dari kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao belum berjalan maksimal karena peningkatan pendapatan masih rendah, produktivitas tanaman kakao masih rendah, dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan mutu tanaman kakao masih sedikit yang tahu betul bagaimana cara pengelolaan yang baik agar menghasilkan mutu biji kakao yang baik dan dapat bersaing dengan wilayah lain dan menjadikan sumber pendapatan bagi mereka.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Penyuluhan menyatakan bahwa :

“Dalam program gernas kakao masih belum tepat sasaran karena masyarakat masih banyak yang belum memahami dengan jelas sasaran dari adanya program kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao, dan masyarakat yang membutuhkan lebih banyak dibanding fasilitas yang disediakan dari kebijakan ini.” (wawancara dengan SD. Selasa, 11-04-2017).

Program gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao belum tepat sasaran karena kebijakan dikatakan tepat sasaran jika yang melakukan dan menerima kebijakan memahami betul tujuan dan sasaran dari program tersebut dan mampu bekerja sama tanpa adanya unsur kepentingan pribadi di dalamnya namun yang terjadi kemudian di lapangan tidak sesuai yang diharapkan sebab pemerintah dan masyarakat petani sama-sama memiliki pemahaman yang berbeda dan tidak banyak dari mereka yang mengetahui tujuan dari kebijakan ini. Lanjut dari itu, Ketua Kelompok Tani II Desa Singa menyatakan bahwa :

“Dalam program ini masih banyak yang tidak tetap sasaran, contohnya masih banyak masyarakat petani yang betul-betul perlu mengikuti program ini namun tidak terdaftar karena dilihat dari potensi lahan dan potensi petani itu sendiri namun hal yang paling mendasar kebijakan

ini memang memiliki terbatas.” (wawancara dengan PA. Senin, 18-04-2017).

Kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao tidak berjalan sesuai harapan karena sedikitnya kegiatan atau alternatif yang difasilitasi dari kebijakan ini mengakibatkan masyarakat petani yang betul-betul memenuhi persyaratan untuk turut serta dalam program kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao tidak terdaftar dalam kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah yang bersangkutan. Senada pula dengan, Ketua Kelompok Tani III Desa Borong juga menyatakan bahwa :

“Dalam Program ini pencapaian sasaran dari gernas kakao belum sepenuhnya maksimal sebab masih banyak yang belum mendapatkan manfaat dari program ini dan masih banyak yang tidak tepat sasaran dalam pemberian bantuan baik sarana dan prasarana untuk tercapainya tujuan dan sasaran dari program ini, serta masyarakat juga masih banyak yang belum mengetahui jelas apa yang ingin dicapai dari program ini, hanya diikuti sebagai anggota saja.” (wawancara dengan HA. Rabu, 19-04-2017).

Program gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang belum tepat sasaran atau belum maksimal karena masih banyak yang tidak menerima program kebijakan tersebut dan lebih banyak yang membutuhkan manfaat dari program ini karena bantuan berupa sarana dan prasarana untuk suksesnya sebuah program terbatas dan masyarakat petani kakao hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah tanpa berinisiatif untuk berusaha mengembangkan bagaimana agar produktivitas tanaman kakao mereka berhasil.

C. Dampak Kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba

Dampak kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba merupakan suatu acuan

keberhasilan kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di wilayah tersebut serta bertujuan untuk melihat hasil akhir dari berjalan program kebijakan ini sudah mencapai target atau tidak maksimal. Yang ingin dilihat dari dampak kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao mencakup (1) Efektivitas (kinerja), (2) Efisiensi (SDM dan anggaran), dan (3) Kecukupan (sarana dan prasarana).

1. Efektivitas

Tercapainya hasil serta tujuan evaluasi kebijakan program yang telah disusun dan telah dilaksanakan. Dan menurut Hidayat (2003) yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Sebagaimana semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya yang dilihat adalah (kinerjanya).

a Kinerja

Suatu hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Hortikultura Perkebunan menyatakan bahwa :

“Dalam program ini tujuan yang ingin dicapai belum maksimal diakibatkan pihak-pihak yang terlibat baik masyarakat petani maupun yang memiliki wewenang penuh dalam program ini belum mencapai hasil yang ingin dicapai, contoh peningkatan pendapatan, dan produktivitas kakao dan masih banyak yang belum sesuai dengan harapan awal dari kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao.” (wawancara dengan IS. Senin, 10-04-2017).

Pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan ini baik masyarakat petani maupun yang memiliki wewenang penuh dalam kebijakan ini belum mencapai hasil yang ingin dicapai karena telah dijelaskan bahwa begitu banyak kendala yang terjadi contohnya masyarakat belum memahami jelas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, adanya unsur politik di dalamnya, lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibanding kepentingan bersama yang mengakibatkan harapan awal dari kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran awal yang ingin dicapai. Senada dengan itu, Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba menyatakan bahwa :

“Dalam program ini apa yang ingin dicapai sebenarnya sudah dilaksanakan namun belum maksimal karena kerjasama tim dibutuhkan dalam mensukseskan program ini, termasuk kerjasama antar masyarakat petani kakao namun mereka cenderung lebih mementingkan kepentingan sendiri dan keuntungan sendiri contohnya pembagian sarana dan prasarana tidak merata karene adanya unsur kekeluargaan di dalamnya.” (wawancara dengan SU. Senin, 10-04-2017).

Kinerja pemerintah dan masyarakat petani kakao yang ingin dicapai belum terpenuhi dengan baik karena masih banyak kendala yang terjadi baik dari yang menjalankan program maupun yang penerima program karena apa yang diharapkan oleh pemerintah berbeda dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat khususnya petani kakao, serta kerjasama tim juga sangat dibutuhkan karena pemerintah menginginkan masyarakat memiliki keterampilan dengan berjalannya kebijakan ini sedangkan masyarakat menginginkan bantuan tanpa berinisiatif memiliki keterampilan dalam mensukseskan program gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Lanjut dari itu, Ketua kelompok I Desa Singa mengatakan bahwa:

“Kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba belum mencapai target yang diinginkan karena ada yang memanfaatkan situasi ini agar mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri” (wawancara dengan AS. Rabu, 12-04-2017).

Kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao tidak mencapai target yang diinginkan karena tidak adanya kerjasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat, adanya unsur politik di dalamnya sehingga tidak efektif sebab dana yang bisa dipakai dan menyelesaikan kebijakan dengan baik disalahgunakan oleh segelintir oknum yang memiliki wewenang dari terselenggaranya kebijakan ini. Berikut pula dengan Ketua Kelompok Tani I Desa Borong mengatakan bahwa:

“Dalam program ini apa yang ingin dicapai tidak sesuai dengan harapan sebab para anggota kelompok menginginkan bantuan agar tanaman kakao mereka menghasilkan benih yang bermutu dan pemerintah juga tidak memperhatikan dengan baik dan hanya mempercayakan kepada orang mereka berikan tugas padahal kerjanya tidak baik” (wawancara dengan MA. Rabu, 12-04-2017).

Program kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao tidak tercapai sesuai dengan harapan karena pemerintah dan masyarakat khususnya petani kakao tidak bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama sehingga apa yang seharusnya efektif menjadi tidak efektif karena tidak memiliki tujuan yang sama agar program kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao tercapai dengan baik dan maksimal.

2. Efisiensi

Suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber atau biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat mengetahui bahwa program yang dijalankan pemerintah setempat untuk mensukseskan gerakan nasional

peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba tidak efisien dengan kata lain yang dibutuhkan dan diterima tidak seimbang. Yang mempengaruhi yaitu (a) Sumber Daya Manusia dan (b) Anggaran.

2.a Sumber Daya Manusia

Salah faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencan untuk mencapai tujuan baik institut maupun perusahaan. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Bidang Hortikultura Perkebunan Kabupaten Bulukumba yang menjelaskan bahwa :

“Dalam Kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao masih banyak yang tidak memahami apa maksud dan tujuan dari kebijakan ini, dengan kata lain yang diberikan kepercayaan tidak menjalankan tugas dengan baik” (wawancara dengan IS. Senin, 10-04-2017).

Program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mewujudkan peningkatan produksi dan mutu kakao masih banyak yang tidak terealisasi dengan baik, sebab yang diberikan tanggungjawab untuk mengsucceskan program ini tidakmengetahui betul apa maksud dan tujuan diadadakan kebijakan ini. Terkadang ada perbedaan pendapat yang pada akhirnya mereka saling menyalahkan sebab masyarakat petani kakao tidak mengetahui betul hak dan kewajiban mereka ikut dalam program ini dan pemerintah lebih cenderung merasa bodoh karena jika mereka sudah menjelaskan hak dan kewajiban setiap petani kakao yang ikut dalam program ini mereka tidak akan menjelaskan kembali. Senada dengan itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana menyatakan bahwa :

“Dalam program gerakan nasional kakao yang telah berjalan 5 tahun kemarin memang tidak sesuai dengan ukuran keberhasilan suatu

kebijakan sebab rekan kerja hanya memburu dollar dengan menyelesaikan cepat kewajibannya tanpa memperdulikan apakah memang memberikan manfaat yang baik bagi petani dan bagi tercapainya tujuan dari kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao.” (wawancara dengan SU. Senin, 10-04-2017).

Efisiensi dari program kebijakan gerakan nasional dan peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba tidak mencapai target yang ingin dicapai dan dalam program gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao yang telah berjalan selama 5 tahun terakhir tidak sesuai dengan ukuran keberhasilan suatu kebijakan sebab rekan kerja hanya memburu dollar dengan menyelesaikan cepat kewajibannya tanpa memperdulikan apakah memang memberikan manfaat yang baik bagi petani dan bagi tercapainya tujuan dari kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Lanjut dari itu Ketua Kelompok Tani I Desa Singa juga mengatakan :

“Dalam program gernas kakao di daerah kami memang masih banyak masyarakat petani yang belum memahi dengan baik apa hak dan kewajiban mereka sebab mereka menginginkan bantuan lebih dari pemerintah sehingga apa yang terjadi untuk program ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai.” (wawancara dengan AS. Rabu, 12-04-2017).

Kebijakan gernas kakao di wilayah tersebut masih tidak efisien atau tidak sesuai dengan yang direncanakan sebab tidak ada kerjasama yang baik. Masyarakat juga cenderung ingin bantuan yang lebih padahal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk tercapainya kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao sudah diatur dan memiliki batasan-batasan namun pemahaman mereka berbeda jauh dengan pemerintah sebab pemerintah juga tidak menjelaskan secara mendetail mengenai ruang lingkup kebijakan

gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut pula dengan, Ketua Kelompok Tani I Desa Borong mengatakan bahwa:

“Kebijakan gerakan nasional memang tidak efisien sebab adanya unsur politik di dalam terselenggaranya kebijakan ini, sehingga memberikan mereka keuntungan pribadi, padahal kebijakan ini dibuat untuk menghasilkan kualitas tanaman kakao yang mampu bersaing dengan pasar dunia” (wawancara dengan MA. Rabu, 12-04-2017).

Kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao tidak berjalan secara efisien sebab adanya unsur politik dalam kebijakan ini yang semata-mata ingin mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan tujuan awal dari kebijakan ini dan apa yang ingin dicapai dari adanya kebijakan ini, sehingga mereka tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka masing-masing dengan baik.

2.b Anggaran

Suatu rencana yang disusun secara sistematis untuk membiayai sebuah kebijakan agar mencapai target yang diinginkan sebab tanpa dana kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Bidang Hortikultura Perkebunan Kabupaten Bulukumba yang mengatakan bahwa:

“Dalam Kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao masih banyak yang tidak mendapatkan manfaat dari program kebijakan gerakan nasional kakao di wilayah tersebut, sebab dana atau bantuan lain dari pemerintah untuk kesuksesan program ini dan kesejahteraan masyarakat petani kakao melebihi dari jumlah yang membutuhkan” (wawancara dengan IS. Senin, 10-04-2017).

Program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mewujudkan peningkatan produksi dan mutu kakao masih banyak yang tidak terealisasi dengan baik, sebab bantuan pemerintah untuk mengsucceskan program ini tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan dan masyarakat juga cenderung

selalu ingin dibantu oleh pemerintah agar tanaman kakao yang mereka produksi berjalan dan menghasilkan mutu yang baik, dan adanya segelintir dari mereka yang menyalahgunakan wewenang berdasarkan apa yang peneliti dengar dari mulut masyarakat petani kakao itu sendiri. Senada dengan itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana menyatakan bahwa :

“Dalam program gerakan nasional kakao yang telah berjalan 5 tahun kemarin memang tidak sesuai dengan ukuran keberhasilan suatu kebijakan sebab rekan kerja hanya memburu dollar dengan menyelesaikan cepat kewajibannya tanpa memperdulikan apakah memang memberikan manfaat yang baik bagi petani dan bagi tercapainya tujuan dari kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao.” (wawancara dengan SU. Senin, 10-04-2017).

Efisiensi dari program kebijakan gerakan nasional dan peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba tidak mencapai target yang ingin dicapai dan dalam program gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao yang telah berjalan selama 5 tahun terakhir tidak sesuai dengan ukuran keberhasilan suatu kebijakan sebab rekan kerja hanya memburu dollar dengan menyelesaikan cepat kewajibannya tanpa memperdulikan apakah memang memberikan manfaat yang baik bagi petani dan bagi tercapainya tujuan dari kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao.

Lanjut dari itu Ketua Kelompok Tani I Desa Singa juga mengatakan :

“Dalam program gernas kakao di daerah kami memang masih banyak masyarakat petani yang membutuhkan bantuan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kesejahteraan mereka sebagai petani kakao namun apa yang dibutuhkan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan sebab mereka menginginkan bantuan lebih dari pemerintah sehingga apa yang terjadi untuk program ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai.” (wawancara dengan AS. Rabu, 12-04-2017).

Kebijakan gernas kakao di wilayah tersebut masih tidak efisien atau tidak sesuai dengan yang direncanakan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat petani kakao karena tujuan awal dari kebijakan gernas kakao yaitu sebagai peningkatan pendapatan, produktifitas mutu kakao, tetapi semua itu tidak akan berjalan dengan baik ketika fasilitas yang ada tidak maksimal dan akan menghasilkan sesuatu yang diluar dari rencana suksesnya kebijakan gernas kakao, karena suksesnya sebuah kebijakan ketika apa yang direncanakan sebelumnya memang betul-betul mencapai target awal dari program ini. Berikut pula dengan, Ketua Kelompok Tani I Desa Borong mengatakan bahwa:

“Kebijakan gerakan nasional memang tidak efisien sebab adanya unsur politik di dalam terselenggaranya kebijakan ini, sehingga memberikan mereka keuntungan pribadi, padahal kebijakan ini dibuat untuk menghasilkan kualitas tanaman kakao yang mampu bersaing dengan pasar dunia” (wawancara dengan MA. Rabu, 12-04-2017).

Kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao tidak berjalan secara efisien sebab adanya unsur politik dalam kebijakan ini yang semata-mata ingin mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan tujuan awal dari kebijakan ini dan apa yang ingin dicapai dari adanya kebijakan ini, sehingga mereka tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka masing-masing dengan baik.

3. Kecukupan

Proses pencapaian program yang dinilai cukup dan memadai kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat mengetahui bahwa program yang dijalankan pemerintah setempat untuk mensukseskan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba belum bisa dikatakan cukup dan

memadai bagi kebutuhan masyarakat. Yang dilihat dari (a) sarana dan (b) prasarana.

3.a Sarana

Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan dari kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Hal ini ditegaskan pula oleh Kepala Bidang Hortikultura Perkebunan yang menyatakan bahwa :

“Dalam kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten bulukumba belum memadai sebab masih banyak yang belum mendapatkan bantuan sarana maupun terpenuhinya permintaan masyarakat petani agar lebih diperhatikan lagi, namun keterbatasan biaya maka masyarakat yang didaftarkan juga disesuaikan dengan kuota yang ada.” (wawancara dengan IS. Senin, 10-04-2017).

Kebijakan tidak akan maksimal ketika kebutuhan masyarakat tidak memadai, karena keberhasilan suatu program ketika masyarakatnya berhasil sukses dalam kebijakan yang telah dilakukan maka dapat dikatakan berhasil karena sebagai perwakilan masyarakat mereka mampu memberikan contoh yang baik untuk masyarakatnya terutama dalam kebijakan gernas kakao yang telah dicanangkan oleh pemerintah mulai tahun 2008 dan berakhir tahun 2016 kemarin namun apa yang kemudian terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Senada dengan itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana menyatakan bahwa :

“Dalam Kebijakan ini memang masih banyak kekurangan karena masih banyak masyarakat petani yang belum mendapatkan bantuan sehingga tidak berjalan dengan baik sebab masyarakat selalu ingin diberikan bantuan yang lebih” (wawancara dengan SU. Senin, 10-04-2017).

Pemerintah tidak bekerja sama dengan baik kepada masyarakat agar tujuan awal dari program ini berjalan secara maksimal, namun karena sama-sama mementingkan kepentingan pribadi yang harusnya bisa memadai menjadi tidak sebab mereka mencari keuntungan dari kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah itu sendiri, ada oknum yang telah melalaikan wewenang serta mengambil kesempatan untuk kebaikan beberapa pihak berdasarkan apa yang peneliti dengar di lapangan dan memang tidak sedikit yang mengeluhkan hal tersebut.

Lanjut dari itu Ketua Kelompok Tani I Desa Singa menyatakan bahwa :

“Dalam program yang dilakukan pemerintah di wilayah ini masih belum memadai sebab masyarakat mengeluh terhadap bentuk bantuan pemerintah kepada mereka yang tidak memadai dan tidak merata. Dan itu juga yang membuat saya heran apakah kebijakan ini memang baik untuk anggota kelompok yang berada di wilayah tersebut” (wawancara dengan AS. Rabu, 12-04-2017).

Kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao selama berjalannya program ini ada oknum yang melakukan tindak korupsi untuk kepentingan pribadi sehingga manfaat dari tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan gernas kakao itu sendiri tidak dapat terpenuhi dengan baik dan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya oknum yang bersekongkol dalam penyalahgunaan wewenang, mengapa demikian karena dari observasi yang peneliti lakukan sebelumnya bukan hanya dua atau tiga orang saja yang mengeluhkan terhadap persekongkolan oknum yang memiliki kewenangan dalam program ini serta adanya penyalahgunaan oleh aparatur pemerintah itu sendiri. Berikut pula dengan, Ketua Kelompok I Desa Borong mengatakan bahwa:

“Sarana yang telah dipersiapkan oleh pemerintah belum memadai sebab ada segelintir orang yang mengambil kesempatan dari adanya kebijakan ini dan tidak memperdulikan dampak dari keegoisan

mereka, sehingga kebutuhan dari kebijakan ini tidak memenuhi standar” (wawancara dengan MA. Rabu, 12-04-2017).

Sarana yang diberikan pemerintah untuk mensukseskan kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao tidak sesuai dengan harapan dan karena adanya unsur politik di dalam terselenggaranya kebijakan ini membuat kebijakan ini tidak sepenuhnya memadai bagi kebutuhan yang masyarakat butuhkan untuk meningkatkan produktifitas mutu tanaman kakao yang merupakan sumber pendapatan petani kakao dan sumber devisa negara yang mampu bersaing dengan dunia.

3.b Prasarana

Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses dalam mensukseskan kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Hortikultura Perkebunan Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa:

“Dalam kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten bulukumba belum memadai sebab masih banyak yang belum mendapatkan keuntungan dari adanya program ini karena adanya keterbatasan sumber daya baik bantuan sarana dan prasarana maupun terpenuhinya permintaan masyarakat petani agar lebih diperhatikan lagi, namun keterbatasan biaya maka masyarakat yang didaftarkan juga disesuaikan dengan kuota yang ada.” (wawancara dengan IS. Senin, 10-04-2017).

Kebijakan tidak akan maksimal ketika kebutuhan masyarakat tidak memadai, karena keberhasilan suatu program ketika masyarakatnya berhasil sukses dalam kebijakan yang telah dilakukan maka dapat dikatakan berhasil karena sebagai perwakilan masyarakat mereka mampu memberikan contoh yang baik untuk masyarakatnya terutama dalam kebijakan gernas kakao yang telah

dicanangkan oleh pemerintah mulai tahun 2008 dan berakhir tahun 2016 kemarin namun apa yang kemudian terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan agar kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao mencapai hasil yang diinginkan. Senada dengan itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana menyatakan bahwa :

“Dalam Kebijakan ini memang masih banyak kekurangan karena masih banyak masyarakat petani yang belum mendapatkan bantuan dari program ini yang mengakibatkan program ini tidak berjalan dengan baik sebab masyarakat selalu ingin diberikan bantuan yang lebih untuk kepentingan perkebunan mereka dan tidak memiliki inisiatif untuk mengembangkan hasil bumi mereka agar memiliki daya saing yang baik diluar sana.” (wawancara dengan SU. Senin, 10-04-2017).

Pemerintah tidak bekerja sama dengan baik kepada masyarakat agar tujuan awal dari program ini berjalan secara maksimal, namun karena sama-sama mementingkan kepentingan pribadi yang harusnya bisa memadai menjadi tidak sebab mereka mencari keuntungan dari kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah itu sendiri, ada oknum yang telah melalaikan wewenang serta mengambil kesempatan untuk kebaikan beberapa pihak berdasarkan apa yang peneliti dengar di lapangan dan memang tidak sedikit yang mengeluhkan hal tersebut dan yang mengakibatkan program ini tidak berjalan dengan baik sebab masyarakat selalu ingin diberikan bantuan yang lebih untuk kepentingan perkebunan mereka dan tidak memiliki inisiatif tersendiri bagaimana cara pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan tanaman kakao yang bermutu. Lanjut dari itu Ketua Kelompok Tani I Desa Singa menyatakan bahwa :

“Dalam program yang dilakukan pemerintah di wilayah ini masih belum memadai sebab masyarakat mengeluh terhadap bentuk bantuan pemerintah kepada mereka yang tidak memadai dan tidak merata. Dan itu juga yang membuat saya heran apakah kebijakan ini memang baik untuk anggota kelompok yang berada di Desa Singa ataukah dari

adanya kebijakan ini ada unsur politik untuk mendapatkan keuntungan pribadi.” (wawancara dengan AS. Rabu, 12-04-2017).

Kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao selama berjalannya program ini ada oknum yang melakukan tindak korupsi untuk kepentingan pribadi sehingga manfaat dari tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan gernas kakao itu sendiri tidak dapat terpenuhi dengan baik dan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya oknum yang bersekongkol dalam penyalahgunaan wewenang, mengapa demikian karena dari observasi yang peneliti lakukan sebelumnya bukan hanya dua atau tiga orang saja yang mengeluhkan terhadap persekongkolan oknum yang memiliki kewenangan dalam program ini serta adanya penyalahgunaan aparatur pemerintah yang harusnya jadi panutan agar kebijakan ini melahirkan masyarakat yang sejahtera. Berikut pula dengan, Ketua Kelompok I Desa Borong mengatakan bahwa:

“Prasarana yang telah dipersiapkan oleh pemerintah belum memadai sebab ada segelintir orang yang mengambil kesempatan dari adanya kebijakan ini dan tidak memperdulikan dampak dari keegoisan mereka, sehingga kebutuhan dari kebijakan ini tidak memenuhi standar” (wawancara dengan MA. Rabu, 12-04-2017).

Prasarana yang diberikan pemerintah untuk mensukseskan kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao tidak sesuai dengan harapan dan karena adanya unsur politik di dalam terselenggaranya kebijakan ini membuat kebijakan ini tidak sepenuhnya memadai bagi kebutuhan yang masyarakat butuhkan untuk meningkatkan produktifitas mutu tanaman kakao yang merupakan sumber pendapatan petani kakao dan sumber devisa negara yang mampu bersaing dengan dunia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba belum maksimal karena jika dilihat dari (a) **Pemerataan** kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao belum memadai karena apa yang ingin dicapai baik dari segi peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi belum mencapai hasil yang diinginkan. (b) **Responsivitas** masyarakat petani kakao terhadap kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao mendapat respon yang baik oleh masyarakat baik dari Kebijakan dan Tujuan namun masyarakat petani kakao belum memahami apa tujuan dan kebijakan dengan baik. (c) **Ketetapan** gernas kakao belum mencapai target karena tidak berjalan secara maksimal sebab sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba belum tepat.
2. Dampak kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba tidak sesuai apa yang diharapkan jika dilihat dari (a) **Efektifitas** kebijakan gernas kakao tidak sesuai dengan target sebab kinerja dari yang menjalankan kebijakan ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. (b) **Efisiensi** kebijakan gernas kakao tidak mencapai target yang diinginkan sebab sumber daya manusia melebihi dari anggaran yang telah diberikan pemerintah untuk berjalan kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di

Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. (c) **Kecukupan** kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao belum memadai sebab sarana dan prasarana tidak mencukupi dari jumlah masyarakat petani yang membutuhkan program ini sebagai peningkatan pendapatan, kesejahteraan petani kakao, dan sumber devisa negara.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah atau dinas kehutanan dan perkebunan memberikan perhatian penuh dalam meningkatkan produktifitas dan mutu kakao melalui program gerakan nasional kakao.
2. Perlunya sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat petani kakao agar betul-betul memahami tujuan adanya program gerakan nasional kakao baik kegiatan rehabilitasi, peremajaan, intensifikasi dan bagaimana pengelolaan mutu kakao yang baik.
3. Harusnya untuk mencapai tujuan program gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao, baik masyarakat petani kakao maupun pemerintah yang diberikan kepercayaan mengembangkan amanah memang betul-betul memahami tujuan dan sasaran dari program ini.
4. Hendaknya pemerintah menjelaskan secara mendetail apa tujuan yang diinginkan dari adanya program kebijakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao sehingga masyarakat memahami dengan baik.
5. Perlunya masyarakat dan juga pemerintah mengetahui betul target, sasaran dan tujuan dari kebijakan gernas kakao yang ingin dicapai dengan cara bekerja sama dengan baik tanpa adanya unsure politik di dalam menjalankan kebijakan ini.

6. Perlunya pula sosialisasi yang mengarah secara langsung dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan produksi dan mutu kakao di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.
7. Harusnya pemerintah menjalankan tugasnya sebagaimana prosedur yang ada agar masyarakat khususnya masyarakat petani tidak kecewa terhadap kinerja atau tanggungjawab yang telah dipercayakan kepada mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, Said. 2012. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo, 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah mada University Press.
- Idrus, Megawati. 2013. *Skripsi Evaluasi Kebijakan Outsourcing*. Makassar
- Kadji, Yulianto. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Dalam Perspektif Realitas)*. Tulungagung: Cahaya Abadi
- Madani, Muhlis, dkk. 2015. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*. Makassar.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: Gramedia.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance*. Bandung : Mandar Maju
- Subarsono, AG. 2010. *Analisa Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Website:

Ditjenbun-Kebijakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao 2013.pdf

<http://bulukumbakab.go.id/content/potensi-perkebunan> (diakses pada tgl 29 november 2016, pukul 22.30)

<http://www.businessnews.co.id/ekonomi-bisnis/gerakan-nasional-peningkatan-produksi-dan-mutu-kakao.php> (diakses pada tgl 16 mei 2013, pukul 10.30 wita)

<http://www.kakao-indonesia.com/index.php/web-links/126-mengupas-gernas-kakao-> (diakses pada tgl 16 februari 2017, pukul 14.30 wita)

Pedoman Teknis Kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao 2013.pdf

Pedoman Umum Kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao 2013.pdf

Program Gerakan Nasional Percepatan Revitalisasi Kakao Nasional (GERNAS).pdf

Perundang-undangan

Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts. / /2013 Tentang Penetapan Kelompok Tani Dan Petani Peserta Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kabupaten Bulukumba Tahun 2013

Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.78/Ii/2012 Tentang Penetapan Kelompok Tani Dan Petani Peserta Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan (Gernas Kakao) Kabupaten Bulukumba Tahun 2012

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 66/Kpts/Dishutbun/Ii/2015 Tentang Penetapan Kelompok Tani Dan Petani Peserta Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kabupaten Bulukumba Tahun 2015

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 77/Kpts/Dishutbun/Iii/2014 Tentang Penetapan Kelompok Tani Dan Petani Peserta Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kabupaten Bulukumba Tahun 2014

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : Kpts. /Dishutbun/Ii/2016 Tentang Penetapan Kelompok Tani Dan Petani Peserta Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016

Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1832/Kpts/OT.160/4/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao